

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PENJAGA
TAMBAK DESA KEDUNG PELUK KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

Nurul Fadhilah

NIM : C72214099



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fadhilah
NIM : C72214099
Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah/
Perdata Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga
Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Maret 2018
Saya yang menyatakan,



Nurul Fadhilah

NIM. C72214099

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo" , yang ditulis oleh Nurul Fadhlilah NIM. C72214099 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Januari 2018
Pembimbing,



Prof. Dr.H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195201211981021002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Fadhilah NIM C72214099 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari ini Kamis 26 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu sdalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji 1,



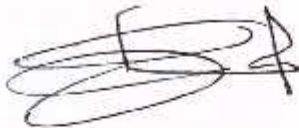
Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195201211981021002

Penguji 2



Dr. H. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji 3,



Dr. H. Mohammad Arif, L.C., M.A.
NIP. 1970011820021210001

Penguji 4,



Siti Tatmainul Qulub, M.Si
19891229201503207

Surabaya, 26 April 2018

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., MII.
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Fadhilah
NIM : C72214099
Fakultas/Jurusan : Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : dhilahnurul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk

Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Mei 2018

Penulis


Nurul Fadhilah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo” adalah merupakan hasil penelitian lapangan atau (*Field Research*) untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) bagaimana mekanisme pengupahan antara pemilik tambak dan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan antara pemilik tambak dan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini berorientasi pada penelitian lapangan, serta menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan kasus yang dianalisis, serta sumber data diperoleh dari data primer yang meliputi data keterangan pemilik tambak dan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk, dan data sekunder yang bersifat membantu, menunjang serta memperkuat data yang diperoleh dari lapangan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, Pelaksanaan pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pada awal akad diberikan ketika panen. Namun, ketika masa panen pemilik tambak tidak melakukan perhitungan modal dan tidak memberikan upah kepada penjaga tambak, pemilik tambak memberikan upah berdasarkan perkiraanya. *Kedua*, Dalam pandangan hukum Islam pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah menyimpang, karena pemilik tambak telah menanggukuhkan upah penjaga tambak hingga tiga kali masa panen dan upah yang diberikan bersifat samar.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya pemilik tambak memperhatikan syarat-syarat dan rukun dalam pelaksanaannya. Agar dalam melaksanakan pengupahan penjaga tambak tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Ketika pemilik tambak melakukan perhitungan modal dalam pemberian upah hendaknya dilakukan secara transparan, agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II	
IJARAH MENURUT HUKUM ISLAM.....	20
A. Pengertian <i>Ijarah</i>	20
B. Landasan Hukum <i>Ijarah</i>	23
C. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	25
D. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diperuntukkan bagi umat manusia seluruhnya di muka bumi. Ajaran Islam tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja akan tetapi untuk semua umat manusia, baik umat Islam maupun umat agama lain. Islam adalah rahmatan lil 'alamin, rahmat bagi semesta alam. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk menjaga dan melindungi alam beserta isinya.¹ Islam juga mengajarkan kepada umatnya bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi dengan Allah (ḥablun minallak), namun mencakup pula masalah hubungan antara sesama manusia (ḥablun minannas), bahkan juga mengatur hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan.²

Manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, dan dianugerahi akal sebagai pembeda dari makhluk lainnya.³ Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Baik itu berupa sandang, pangan, dan tukar menukar dengan melalui bisnis atau jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya.

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 5.

² Adimarwan Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 2.

³ Syaichul Hadi Purnomo, *Antologi Kajian Islam* (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2004), 123.

Mayoritas penduduk di Desa Kedung Peluk tidak memiliki lahan tambak. Sebagian besar mata pencaharian mereka adalah sebagai penjaga tambak, pemilik tambak di Desa Kedung Peluk berasal dari desa tetangga yang masih dalam satu kecamatan. Penjaga tambak menjaga tambak di Desa Kedung Peluk tidak terikat waktu, akan tetapi mereka harus bertanggungjawab atas ikan yang berada di dalam tambak tersebut. Pemilik tambak menjelaskan akan memberikan upah kepada penjaga tambak pada saat setiap panen. Namun ketika panen pemilik tambak tidak segera memberikan upah kepada penjaga tambak, melainkan satu tahun pemilik tambak melakukan perhitungan upah dan perhitungan modal. Sedangkan satu tahun terdapat 4 (empat) kali panen. Akan tetapi penjaga tambak boleh berhutang kepada pemilik tambak maksimal Rp. 600.000 per bulan, hal ini tergantung persetujuan dari pemilik tambak.

Ketika panen tiba, pemilik tambak juga langsung membawa hasil panen ke gudang, dan tidak menimbang ikan ditambak. Hal ini menyebabkan penjaga tambak tidak mengetahui berat hasil panen yang akan dijual. Pemilik tambak memberikan upah kepada penjaga tambak sesuai dengan perkiraannya

Hal ini berbeda dengan mekanisme pengupahan yang dilakukan oleh pemilik tambak yang lain, disana ada sekelompok pemilik tambak yang jujur

Dari pemaparan penulis, dapat diketahui bahwa pemilik tambak mempersulit dan menunda pemberian upah kepada penjaga tambak, juga terdapat ketidakjelasan pemberian upahnya. Hal ini membuat penulis ingin mendeskripsikan masalah tentang pengupahan terhadap para penjaga tambak atas hasil panen ikan yang telah dikerjakan, dan menurut penulis setelah diamati dalam praktik di lapangan terdapat perbedaan dengan konsep yang ada dalam hukum Islam yaitu ijarah.

Dalam mengontrak seorang pekerja harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Persoalan yang harus digarispawahi adalah besaran nominal upah yang tidak jelas nominalnya, dan pemberian upah yang ditunda. Dari alasan tersebut terdapat masalah yang menarik untuk dikaji. Untuk itu penulis akan meneliti lebih jauh lagi apakah penetapan *ujrah* di atas sesuai dengan hukum Islam. Maka dari itu penulis meneliti permasalahan tersebut melalui skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”.

[illegible]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah- masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Mekanisme pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
2. Pemberian upah yang tidak jelas nominalnya
3. Besaran upah yang diterima masing- masing penjaga tambak
4. Faktor – faktor yang melatarbelakangi pemberian upah yang tidak jelas nominalnya kepada penjaga tambak
5. Adanya ketidakjelasan jam kerja penjaga tambak
6. Pemberian upah yang ditunda
7. Tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan antara pemilik tambak dan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Untuk memfokuskan permasalahan yang sudah ada di atas, maka penulis membahas pada masalah tentang:

1. Mekanisme pengupahan antara pemilik tambak dan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pengupahan antara pemilik tambak dan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan ini tidak merupakan duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada, diantaranya :

1. M. Farid Fadlullah “Studi Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Berdasarkan Kelebihan Timbangan Di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”. Skripsi ini membahas tentang praktik pengupahan berdasarkan kelebihan timbangan melibatkan dua pihak, yaitu kelompok tani dan pekerja timbang. Kelompok tani sebagai penyewa jasa (musta’jir), sedangkan pekerja timbang sebagai orang yang menyewakan jasanya (muajjir). Objek ljarah nya adalah penimbangan kelapa sawit. Sedang upah pekerja timbang disesuaikan dengan jumlah

kelebihan timbangan, yang keudian diuangkan. Kemudian upah tersebut diberikan dalam jangka waktu sebulan sekali.¹³

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tentang mekanisme pengupahan antara pemilik tambak kepada penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
2. Mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan antara pemilik tambak kepada penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Adapun kegunaan penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut :

- ¹⁷ Fahmi Vidi Alamsyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga*”, (Skripsi-IAIN Purwokerto, 2015)

2. Kegunaan secara Praktis, untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan yang bersifat empiris, khususnya sebagai masukan dan sumbangsih bagi pihak pemilik tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam proses melakukan penetapan *ujrah*.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian yang penulis bahas yaitu:

Hukum Islam : Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hukum muamalah, terkait dengan akad ijarah yang bersumber dari al-Qur'an, hadits maupun beberapa pendapat ulama fiqh.

[illegible]

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

4. Obyek Penelitian

Pengupahan yang diberikan kepada penjaga tambak yang tidak jelas nominalnya, serta pemberian upah yang ditunda di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

5. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, meliputi data primer dan sekunder yaitu :

a. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian.²⁰ yaitu tentang pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pemilik tambak yang berjumlah 6 orang, penjaga tambak yang berjumlah 7 orang, *mreman* yang berjumlah 1 orang, perangkat desa yang berjumlah 1 orang.

²⁰ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2015), 168

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau referensi terdahulu.²¹ Data tersebut sebagian besar merupakan literatur yang terkait dengan konsep hukum Islam dan data ini bersumber dari buku- buku dan catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

- 1) Adimarwan Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*.
- 2) Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*.
- 3) Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*.
- 4) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.
- 5) Ismail, *Perbankan Syariah*.
- 6) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.
- 7) Syaichul Hadi Purnomo. *Antologi Kajian Islam*,
- 8) Dan buku- buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang benar dan tepat ditempat penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

²¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Gholia Indonesia, 2002), 31

a. Teknik *interview* (wawancara)

Wawancara atau dalam istilah lain disebut *interview*,²² *interview* adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap- hadapan secara fisik. Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah pemilik tambak dan penjaga tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data tertulis.²³ Dokumen dapat diperoleh dari buku, arsip, foto dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diperoleh dari peneliti adalah berupa foto yang terdapat dalam lampiran, dan rekaman terkait mekanisme pengupahan yang dilakukan pemilik tambak kepada penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara- cara atau rumus- rumus tertentu. Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan *organizing, editing, dan analyzing*.

²² Alex, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer* (Surabaya: Karya Harapan, 2005), 664

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, 208.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mempelajari data yang sudah terkumpul dan mengolahnya menjadi bahan baku dalam penarikan kesimpulan.²⁵ Dalam menganalisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta- fakta, sifat- sifat atau hubungan fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pengupahan Penjaga Tambak di Kabupaten Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Pola pikir induktif adalah metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta – fakta atau kenyataan dari hasil penelitian tentang pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, kemudian ditinjau dari hukum islam.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membagi sistematika pembahasan dalam lima bab dengan beberapa sub-sub bab, antara lain:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²⁵ Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 240.

kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tentang pengertian dan dasar hukum akad ijarah, rukun dan syarat akad ijarah, macam – macam akad ijarah, berakhirnya akad ijarah, pengertian *ujrah*, dasar hukum *ujrah*, rukun dan syarat *ujrah*, serta jenis – jenis *ujrah*.

Bab ketiga, pada bab ini diterangkan tentang hasil penelitian, yaitu gambaran umum Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dan praktik pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat memuat menerangkan analisis mekanisme pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Dan analisis hukum islam terhadap mekanisme pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima merupakan penutup. Bagian ini berisikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan saran yang digunakan untuk acuan pada penelitian selanjutnya.

BAB II

IJARAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Ijarah

Al ijarah berasal dari kata *Al ajru* yang berarti *Al iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ath thawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah).¹ *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.² Kalau sekiranya kitab-kitab fiqih selalu menerjemahkan kata *ijarah* dengan sewa menyewa, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa suatu barang untuk dimanfaatkan barangnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual '*ain* dan benda itu sendiri.'³

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Hanafiyah dikutip dari Hendi Suhendi, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah terj Kamaluddin A. Marzuki*, (Bandung : Alma'arif, 1988), 15.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 247.

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

⁶ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...*, 114-115.

Begitu juga menyewakan sapi, atau domba, atau unta untuk diambil susunya. Karena penyewaan adalah pemilikan manfaat. Sedangkan dalam keadaan seperti ini, berarti pemilikan susu, padahal ia adalah 'ain (barangnya) itu sendiri. Akad menghendaki pengambilan manfaat, bukan barangnya itu sendiri.

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut mu'ajjir (orang yang menyewakan), sedangkan pihak lain yang menerima sewa disebut musta'jir (orang yang menyewa). Sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut ma'jur (sewaan), sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut ajran atau ujah (upah). Ketika sewa menyewa yang telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dan orang yang

[illegible]

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًا ۖ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
تَجْمَعُونَ ﴿١١﴾

2. Dasar hukum ijtihad dari Al-Hadis adalah :

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَادِينَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ التَّرْعِ فِيهِلُكَ هَذَا وَيَسْلُمُ هَذَا وَيَسْلُمُ هَذَا وَيَهْلُكَ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ

¹¹ Ibid., 647.

bayaran yang telah diketahui dan dapat dipertanggung jawabkan, a hal itu tidak dilarang.¹²

2) Hadis kedua, yakni diriwayatkan:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيَسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." Riwayat Abdul Razzaq.¹³

3. Landasan Ijma

Mengenai disyari'atkannya ijarah, semua umat bersepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada beberapa di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. Ijarah disyari'atkan karena manusia menghajatkannya, mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, membutuhkan tanah untuk bercocok tanam, sebagian mereka membutuhkan sebagian yang lain.¹⁴

C. Rukun dan Syarat

1. Rukun

Menurut Hanafiyah dikutip dari Nasrun Haroen, rukun ija'ah hanya satu yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa

¹² Syaikh Al-Albani *Ebook Mukhtashar Shahih Muslim revisi 1.03 update* (Jakarta: Pembuat Ebook Yoga Permana, 2009), 978.

¹³ Ibid., 940.

¹⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 18.

- a. Aqid (orang yang berakad), yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa)
- b. Shighat (ijab dan qabul)
- c. Upah atau uang sewa
- d. Manfaat barang yang disewakan atau jasa dan tenaga seseorang yang bekerja.¹⁶

Sebagai sebuah transaksi umum, syarat ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad syarat ijarah adalah sebagai berikut

- Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dikutip dari Nasroen Haroen, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka syarat ijarah nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami Wa Adilatuhu* jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.

Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakal itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz boleh melakukan akad syarat ijarah. Namun mereka mengatakan, apabila seorang anak yang mumayyiz melakukan akad ijarah terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan itu, maka akadnya tidak sah.¹⁷ Hal ini didasarkan pada firman Allah surah an- Nisa ayat 29, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ج

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.¹⁸

b. Shighat

Shighat merupakan ucapan atau pernyataan yang dilakukan saat akad yang terdiri dari ijab dan kabul antara mu'jir dan musta'jir, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 235.

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 122.

kaful adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.¹⁹

c. Ujah

Ujah adalah upah atau ganti atas pengambilan manfaat barang atau tenaga orang lain. Ujah disyaratkan harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamr dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad syarat ijarah, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.²⁰

d. Ma'qud 'alaih (barang atau manfaat)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini :

1. Obyek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Para ulama fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dimanfaatkan oleh penyewa.

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 37.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 235.

- ²¹ Abdul Rahman Ghazali, et al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 280.

6. Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja, sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.²³

Ulama fiqh membagi ijarah dalam dua bagian sebagaimana diterangkan dibawah ini:

1. Ijarah atas ain, yaitu menyewa manfaat ain (benda) yang kelihatan, seperti menyewa sebidang tanah untuk ditanami atau sebuah rumah untuk didiami. Asalkan ain nya itu dapat dilihat diketahui tempat atau letaknya. Hal ini juga disebut sewa menyewa.

[illegible]

2. Ijarah diatas pengakuan akan tenaga, yaitu mengupahkan benda atas sesuatu yang dikerjakan, menurut pengakuan si pekerja, barang itu akan diselesaikannya dalam jangka waktu tertentu, menurut upah yang ditentukan. Hal ini dinamakan juga upah mengupah.²⁴

E. Berakhirnya Akad Ijarah

Adapun beberapa hal yang mengakibatkan perjanjian sewa menyewa (ijarah) adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya aib pada barang sewaan, yaitu barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika ditangan pihak penyewa, yang mana kelalaian tersebut diakibatkan oleh pihak penyewa sendiri, misalnya pengguna barang tidak sesuai dengan peruntukan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.
2. Rusaknya barang yang disewakan, yaitu barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi objek sewa menyewa adalah toko, kemudian toko yang diperjanjikan terbakar.²⁵

²⁴ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 139.

²⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 57-58.

Menurut Idris Ahmad dikutip dari Hendi Suhendi, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.²⁸ Pengupahan menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada karena sesuatu yang dikerjakannya. Sedangkan pengupahan menurut syariat pemberian kepada seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus. Misalnya, apabila ada seseorang yang tidak bisa melakukan pekerjaannya lalu dia menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 115.

Dalam perkara upah mengupah tidak dihalalkan melakukan uang hilang sebab perbuatan ini menganiaya penyewa dan hukumnya pun haram karena uang ini tidak ada imbangnya, yang ada imbangnya hanyalah uang sewaan dengan barang yang disewa. Mengupah artinya memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain menurut syarat-syarat tertentu.³⁰

²⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah...*, 225.
³⁰ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i...*, 138.
³¹ M. Rawwas Qal'haji, *Ensiklopedia Fiqih Umar Bin Khattab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 177.

Jadi upah yang dimaksud adalah setiap harta yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, yang memiliki nilai harta dan dapat dimanfaatkan.

G. Dasar Hukum *Ujah*

Dasar yang membolehkan upah dalam firman Allah SWT dan sunnah Rasulullah, sebagai berikut:

1. Dalam al-Qur'an

- 1) Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa orang yang melakukan pekerjaan maka ia akan mendapatkan upah, sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 77:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۚ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya: Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".³²

³² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 455.

- 2) Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa upah diberikan karena menyusui anak, sebagaimana dalam al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فُسْرَتُمْ فَلَهُ أَخْرَىٰ ۖ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.³³

2. Dalam as-Sunnah

- 1) Hadis pertama tentang pemberian upah sebelum kering keringat pekerja, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah.³⁴

- 2) Hadis kedua, yakni diriwayatkan

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا،

³³ Ibid., 946.

³⁴ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), 938.

فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." Riwayat Abdul Razzaq.³⁵

H. Rukun dan Syarat *Ujrah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.

1. 'Aqid (orang yang berakad)

Aqid yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu'jir dan musta'jir. Mu'jir dan musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu.³⁶

2. Sighat Akad

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan isi hati keduanya tentang terjadinya suatu akad, yang ditunjukkan secara lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat. Unsur-unsur dimaksud ijab dan kabul. Dalam ijab dan kabul ada beberapa cara, yaitu:

³⁵ Ibid, 940.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mua'malah...*, 117.

1. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad dan kalau salah seorang diantara mereka merasa dipaksa, maka tidak sah.
2. Hendaknya upah berupa harta yang berguna atau berharga dan diketahui.

[illegible]

Jika manfaat itu tidak dijelaskan dan dapat menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan terhadap objek akad (manfaat) tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, akad penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

1. Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.⁴⁰

⁴⁰ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i* ..., 139.

2. Penjelasan waktu

Ulama Hanafiah tida mensyaratkan untuk menetapkan waktu awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.⁴¹

3. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting ketika menyewa orang untuk melakukan pekerjaan sehingga tidak timbul masalah dikemudian hari.

4. Penjelasan waktu kerja

Penjelasan batasan waktu kerja dijelaskan ketika orang tersebut akan melakukan pekerjaan.

I. Macam-Macam Ujrah

Adapun jenis-jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, yaitu:

1. Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam shalat, puasa, haji dan membaca al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Pendapat Imam Hanafi bahwa menyewa seseorang untuk melakukan perbuatan shalat,

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, 127.

puasa, haji dan membaca al-Qur'an yang pahalanya dijadikan kepada orang tertentu, seperti arwah ibu atau bapak yang menyewa maka haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.⁴²

2. Upah dalam sewa tanah, dibolehkan menyewa tanah, dan disyaratkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman atau tumbuhan. Jika yang dimaksudkan adalah untuk pertanian, maka harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja, yang ia kehendaki, apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka Ijarah dinyatakan fasid (tidak sah). Karena kegunaan tanah itu bermacam-macam, sesuai dengan tanaman. Seperti halnya juga memperlambat tumbuhnya yang ditanam di tanah.⁴³
3. Upah menyusui anak, ada beberapa ulama yang pendapatnya berbeda-beda dalam upah menyusui anak diantaranya adalah as-Shahiban (dua murid Abu Hanifah) dan ulama Syafi'iyah, berdasarkan qiyas tidak boleh menyewa seorang perempuan untuk menyusui ditambah makanan dan pakaiannya karena ketidakjelasan upahnya. Sedangkan Abu Hanifah membolehkannya berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 :

...وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزْعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

⁴² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*..., 226.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj Kamaluddin A. Marzuki..., 24.

Artinya : ...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁴⁴

Allah tidak melarang menyewa perempuan untuk menyusui secara mutlak. Ketidakjelasan upah dalam penyewaan ini tidak menyebabkan pertikaian karena dalam kebiasaan yang berlaku masyarakat bersikap toleran terhadap perempuan yang disewa untuk menyusui itu dan memberikan kemudahan demi kasih sayang terhadap anak-anak. Ulama Malikiyah dan Hanabilah juga menyepakati pendapat ini.⁴⁵

⁴⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 57.

⁴⁵ Wahbah Zuhailly, *Fiqh Islam 5*, terj Abdul Hayyie al-kattani..., 400-401.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kedung Peluk adalah salah satu desa yang terletak di Sidoarjo yang terkenal akan hasil alam yang berupa ikan, yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Desa Kedung Peluk terletak di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo yang memiliki luas wilayah 1.128.665 Ha (719,63 km²). Desa Kedung Peluk mayoritas dikelilingi oleh tambak karena tempatnya yang berada di pelosok kota jauh dari pusat kota. Ketinggian tanah dari permukaan laut yaitu sekitar 1,20 m, daerah ini termasuk kedalam daratan rendah. Desa Kedung Peluk dikelilingi oleh sawah dan tambak, luas tanah Desa Kedung Peluk 1.128.665 Ha digunakan 7.200 Ha sebagai jalan, 61.846 Ha digunakan sebagai sawah dan ladang, 1.031.665 digunakan sebagai empang atau tambak, 31.160 Ha berfungsi sebagai pemukiman warga, 0,72 Ha digunakan sebagai tanah makam, dan untuk lain-lain sebesar 2.545 Ha.¹

[illegible]

Jadi jarak Desa Kedung Peluk ke Kecamatan Candi kurang lebih 6 km dapat ditempuh dengan sepeda motor 45 km/jam. Batas-batas wilayah Desa Kedung Peluk adalah sebagai berikut :²

Tabel 3.1

Tentang komposisi batas wilayah

No.	Batas	Wilayah
1.	Utara	Kelurahan Gebang
2.	Selatan	Desa Banjar Panji
3.	Barat	Desa Kalipecabean
4	Timur	Kelurahan Gebang

Data dari Kantor Kepala Desa Kedung Peluk Tahun 2017.

2. Kependudukan dan Keadaan Sosial Ekonomi

Wilayah Kedung Peluk terbagi menjadi 19 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW) dengan total keseluruhan jumlah penduduk 3522 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

² M. Rudiansyah, *Staf Administrasi Desa*, Wawancara, Sidoarjo 18 Desember 2017

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Desa Kedung Peluk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	1732 jiwa
2.	Perempuan	1790 jiwa
	Jumlah	3522 jiwa

Data dari Kantor Kepala Desa Kedung Peluk Tahun 2017.

Berdasarkan data pada tabel diatas jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Mata pencaharian penduduk atau profesi Desa Kedung Peluk beraneka ragam, diantaranya adalah sebagai berikut :³

³ Data Arsip Demografi Desa Kedung Peluk Tahun 2017.

Tabel 3.3**Profesi Penduduk Desa Kedung Peluk**

Jenis Mata Pencarian Masyarakat Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo		
No	Pekerjaan	Jumlah
1	Buruh tani	28
2	Buruh usaha perikanan	30
3.	Nelayan	32
4	Pedagang	8
5	Polri	2
6	Buruh Tambak/Penjaga Tambak	38
7	Pertukangan	24
8	Pensiun	28
9	PNS	25
10	Pengacara	2

Data dari Kantor Kepala Desa Kedung Peluk Tahun 2017.

Masyarakat Kedung Peluk mayoritas mata pencahariannya dikenal sebagai petani tambak oleh masyarakat luas. Adapun mata pencaharian masyarakat Kedung peluk yang lain yaitu sebagai buruh tani, pedagang dan pegawai swasta. Masyarakat Kedung Peluk hampir 70% mereka

adalah buruh penjaga tambak. Sedangkan perdagangan umumnya merupakan pekerjaan sampingan bagi sebagian kecil buruh tambak.

Sebagian hasil bumi mereka adalah hasil tambak yang berupa ikan yang langsung dijual ke pengepul dan atina.⁴ Sektor perdagangan yang ada adalah pedagang perancang atau warung yang menjual kebutuhan sehari-hari. Diantaranya sembako, makanan kecil, obat-obatan dan lain-lain. Ada juga pedagang makanan yang menyediakan bakso, nasi pecel, nasi campur dan lain-lain.

Mayoritas masyarakat Kedung Peluk beragama islam, aktifitas keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Kedung peluk adalah tahlilan dan diba'an. Kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat Kedung Peluk masih aktif dan berjalan seperti biasanya, kecuali pada bulan Ramadhan kegiatan tersebut diliburkan dan dilanjutkan setelah hari raya ketupat.

3. Sarana dan Prasana

Desa Kedung Peluk memiliki 5 masjid dan 4 musholla, sedangkan sekolah yang berada di Desa Kedung Peluk yaitu, TK Dharma Wanita, SDN Kedung Peluk 1, dan MI Islamiyah. Sarana kesehatan yang ada ditengah-tengah desa terletak disebelah Balai Desa yaitu Pondok Kesehatan Desa. Di Desa Kedung Peluk yang masih aktif digunakan yaitu Posyandu balita maupun lansia, dan dilakukan sebulan sekali. Dari hasil

⁴ Mustofa, Wawancara, Sidoarjo, 5 Desember 2017

Adanya fasilitas kesehatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena letak puskesmas sangat jauh dari desa. Jika masyarakat ada yang sakit maka bisa berobat di PONKESDES. Adanya layanan pengobatan gratis ini bisa membantu masyarakat dalam segi ekonomi, hal ini sangat diperlukan karena bisa meringankan biaya berobat.

B. Pelaksanaan Pengupahan Penjaga Tambak Di Desa Kedung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Desa Kedung Peluk merupakan desa paling timur di kecamatan kabupaten Sidoarjo yang dikelilingi oleh berhektar-hektar tambak dan payau. Warga Desa Kedung Peluk mayoritas berpenghasilan sebagai tambak udang, ikan mujair dan bandeng, disini pemilik tambak kebanyakan berasal dari desa Kedung Peluk melainkan dari desa tetangga.

Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Desa Kedung Peluk merupakan desa paling timur di kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo yang dikelilingi oleh berhektar-hektar tambak darat air payau. Warga Desa Kedung Peluk mayoritas berpenghasilan sebagai penjaga tambak udang, ikan mujair dan bandeng, disini pemilik tambak kebanyakan bukan berasal dari desa Kedung Peluk melainkan dari desa tetangga. Dalam mengelola tambak pihak pemilik tambak tidak bisa mengelola tambaknya sendiri, sehingga mereka memerlukan penjaga tambak untuk menjaga dan memberi makanan terhadap ikan ditambak.

Sistem pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pada awal abad diberikan ketika masa panen tiba. Di Desa Kedung Peluk, praktek menyewa jasa penjaga tambak sudah cukup

1. Bapak Marijan selaku pemilik tambak, yang beralamat di Desa Candi, beliau berumur 55 tahun. Penjaga tambak yang bernama bapak Khamim beralamat di Desa Banguwan berumur 48 Tahun. Luas Tambak seluas 1 Ha, yang di isi Ikan Mujair dan Ikan Bandeng. Pemilik Tambak bapak Marijan dan Penjaga Tambak Bapak Khamim sudah melakukan kerjasama selama satu tahun.
2. Bapak Sulaiman yang beralamat di Desa banguwan RT 5 yang berumur 53 tahun sebagai pemilik tambak, dan penjaga tambak dari Bapak Sulaiman bernama Bapak Waji yang beralamat di Desa Banguwan II RT 3. Beliau menjaga tambak milik Bapak Sulaiman selama 11 bulan. Luas tambak Bapak Sulaiman seluas 2 Ha, tambak milik Bapak Sulaiman berisi udang
3. Bapak Suyono selaku pemilik tambak yang beralamat di Desa Kendalpencabean, berumur 58 tahun, memiliki tambak seluas 1,5 Ha yang berisi ikan Bandeng. Penjaga tambak milik Bapak Suyono bernama Bapak Wawan yang berumur 56 tahun, beliau beralamat di Desa Krembung, beliau sudah menjaga tambak milik Bapak Suyono selama 10 bulan.
4. Bapak Mustofa yang beralamat di Desa Kedung Banteng merupakan pemilik tambak, beliau sudah berumur 60 tahun. Luas tambak Bapak Mustofa seluas 1,8 Ha, tambak milik Bapak Mustofa diisi dengan ikan mujair. Penjaga tambak milik Bapak Mustofa bernama Bapak

Karmadi berumur 52 tahun, beliau tinggal di daerah Wates. Bapak Karmadi menjaga tambak milik Bapak Mustofa selama 11 bulan.

5. Bapak Wiratno selaku pemilik tambak tinggal di Desa Tanggulangin, beliau berumur 62 tahun. Beliau memiliki tambak seluas 1,2 Ha, tambak milik bapak Wiratno berisi ikan bandeng dan mujair. Penjaga tambak milik bapak Wiratno bernama Bapak Suparno, beliau berumur 57 tahun. Beliau menjaga tambak milik Bapak Wiratno selama 1 tahun.
6. Bapak Supratman selaku pemilik tambak tinggal di Desa Pangkemi, beliau berumur 55 tahun. Beliau memiliki tambak seluas 1,3 Ha, tambak milik bapak Supratman berisi udang. Penjaga tambak milik bapak Supratman bernama bapak Sidani, beliau berumur 58 tahun. Beliau menjaga tambak milik bapak Supratman selama 1,5 tahun.
7. Bapak Deswanto yang beralamat di Desa Kendal selaku pemilik tambak berumur 60 tahun. Penjaga tambak milik bapak Deswanto bernama bapak Witono, beliau berumur 48 tahun. Tambak milik bapak Deswanto berisi ikan mujair nila, bapak Witono menjaga tambak milik bapak Deswanto selama 2 tahun.
8. Bapak Martoni selaku pemilik tambak beralamat di desa Pampang, beliau berumur 63 tahun. Penjaga tambak bapak Martoni bernama bapak Siswono, beliau berumur 60 tahun. Tambak milik bapak

Berdasarkan penjelasan dari bapak Suparno selaku penjaga tambak, pemilik tambak tidak memberikan upah ketika panen. Namun hanya memberikan bon saja, dalam memberikan bon antara pemilik tambak kepada penjaga tambak tergantung dari persetujuan pemilik tambak. Biasanya pemilik tambak memberikan bon kepada penjaga tambak sebanyak Rp. 600.000 dalam satu bulan. Untuk mendapatkan bon dari pemilik tambak, penjaga tambak mendatangi rumah dari pemilik tambak itu sendiri. Jika penjaga tambak tidak mengajukan bon, maka pemilik tambak tidak mengeluarkan upah untuk penjaga tambak.⁹

Hasil ikan yang dipanen dibawa ke gudang untuk ditimbang dan sebagian hasil

⁹ Suparno, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Desember 2017

tambak tidak memiliki keterbukaan dengan penjaga tambak terkait hasil panen.¹²

Menurut bapak Udin, selaku penduduk di Desa Kedung Peluk yang berprofesi sebagai *mreman* menjelaskan bahwa penjaga tambak di desa Kedung Peluk sering bergonta ganti karena adanya pengupahan yang ditanggihkan dan besaran upah yang tidak jelas nominalnya. Sebagian besar penjaga tambak akan memilih untuk bekerja pada pemilik tambak yang lain ketika mereka sudah mengetahui mekanisme pengupahan yang tidak transparan, yang dilakukan oleh pemilik tambak. Rata-rata penjaga tambak akan memilih bekerja pada pemilik tambak yang lain ketika upahnya sudah dibayar (1 tahun).

Para penjaga tambak lebih memilih untuk mencari pekerjaan lain atau mencari pemilik tambak yang dalam mekanisme pengupahannya transparan. Praktek pengupahan yang demikian masih banyak dijumpai di desa Kedung Peluk. Namun di Desa Kedung Peluk juga tidak sedikit ada pemilik tambak yang jujur, yang dalam mekanisme pengupahannya transparan.¹³

Bapak Sidani selaku penjaga tambak milik bapak Supratman menjelaskan bahwa, upah diberikan ketika panen. Pemilik tambak melakukan perhitungan modal dan upah dalam 4 bulan sekali, pemilik tambak memperbolehkan penjaga tambak untuk mengajukan bon kepada pemilik

¹² Wawan, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Oktober 2017.

¹³ Udin, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Desember 2017.

tambak setiap bulan sebesar Rp. 600.000. hal ini tergantung penjaga tambak dalam mengajukan bon, tidak setiap bulan penjaga tambak mengajukan bon kepada pemilik tambak.¹⁴

Analisis Terhadap Mekanisme Pengupahan Penjaga Tambak Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Pada pembahasan sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai mekanisme pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Di Desa Kedung Peluk mayoritas penduduknya adalah sebagai petani tambak, hal ini dikarenakan Desa Kedung Peluk mayoritas dikelilingi oleh tambak. Kegiatan mengelola lahan tambak merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Desa Kedung Peluk untuk mencapai kemajuan dan kebutuhan dengan cara bekerja sama. Perjanjian sewa menyewa jasa penjaga tambak di Desa Kedung Peluk bukan dilakukan secara tertulis, melainkan melalui lisan atau ucapan.

Pada pembahasan sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai monev pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Di Desa Kedung Peluk mayoritas penduduknya adalah sebagai petani tambak, hal ini dikarenakan Desa Kedung Peluk mayoritas dikelilingi oleh tambak. Kegiatan mengelola lahan tambak merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Desa Kedung Peluk untuk mencapai kemajuan dan kebutuhan dengan cara bekerja sama. Perjanjian sewa menyewa jasa penjaga tambak di Desa Kedung Peluk bukan dilakukan secara tertulis, melainkan melalui lisan atau ucapan.

Pengupahan terhadap penjaga tambak sudah ada sejak dulu dikarenakan pemilik tambak memiliki keterbatasan waktu dalam mengelola lahan tambaknya. Di Desa Kedung Peluk pemilik tambak memiliki lahan rata-rata 1,2 Hektar, kebanyakan pemilik tambak lebih memilih ikan mujair dan bandeng untuk mengisi tambak mereka. Pemilik tambak mengisi tambak menggunakan ikan mujair dan bandeng karena dalam memelihara ikan ini lebih mudah daripada ikan-ikan lain. Dalam menjaga tambak, penjaga tambak

memiliki batasan waktu, melainkan harus menjaga ikan yang berada di dalam tambak hingga panen. Hal ini sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Upah yang diberikan pemilik tambak kepada penjaga tambak pada awal akad dijelaskan akan diberikan ketika masa panen. Masa panen di tambak biasanya 4 bulan sekali, namun ketika panen pemilik tambak tidak memberikan upahnya. Pemilik tambak hanya memberikan bon-bon an saja per bulan kepada penjaga tambak. Bon yang diberikan kepada penjaga tambak rata-rata Rp. 600.000. hal ini tergantung persetujuan dari pemilik tambak, terkadang pemilik tambak tidak memberikan bon kepada penjaga tambak.

Pemilik tambak akan melakukan perhitungan upah dan perhitungan modal kepada penjaga tambak ketika satu tahun, namun dalam perjanjian awal pemilik tambak memberikan upah pada masa panen tiba. Satu tahun sama dengan tiga kali masa panen, yang dimaksud perhitungan upah dan perhitungan modal yaitu pemilik tambak akan memberikan upah atau tambahan dari bon-bon an selama masa panen. Tetapi banyak pemilik tambak yang tidak memberikan tambahan kepada penjaga tambak, karena pemilik tambak hanya memberitahukan bahwa tidak ada tambahan upah untuk penjaga tambak, tanpa ada perhitungan modal terlebih dahulu.

Penjaga tambak tidak bisa memperkirakan upah yang akan diterima, karena pemilik tambak tidak transparan mengenai hasil ikan yang berhasil dipanen. Hal

Mekanisme pengupahan yang dilakukan oleh beberapa pemilik tambak sangat berbeda dengan pengupahan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Kedung Peluk, sebagian pemilik tambak melakukan perhitungan modal dan memberikan upah kepada penjaga tambak ketika sudah berlangsung satu tahun.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Yang Diberikan Pemilik Tambak Kepada Penjaga Tambak

[illegible]

Konsep pengupahan penjaga tambak di Desa kedung Peluk jika ditinjau dari rukun sewa menyewa (ijarah) menurut jumhur ulama yaitu ada empat, adanya mu'jir (pemilik tambak) dan musta'jir (penjaga tambak), adanya sighat (ijab dan qabul) antara kedua pihak yaitu pemilik tambak dan penjaga tambak, ujah (upah) berupa bon yang diberikan kepada penjaga tambak ketika panen dan mulai dilakukan perhitungan modal ketika satu tahun yang seharusnya melakukan perhitungan modal ketika panen, dan juga adanya manfaat yang diambil oleh pemilik tambak yaitu tambaknya ada yang menjaga dan bagi penjaga tambak yaitu mendapatkan upah.

[illegible]

2. Sighat terdiri dari ijab dan kabul antara mu'jir dan musta'jir, dalam pengupahan penjaga tambak, ijab yang dilakukan disini yaitu penjelasan pemilik tambak kepada penjaga tambak tentang kesepakatan kerja antara pemilik tambak dan penjaga tambak mengenai pekerjaan penjagaan tambak di Desa Kedung Peluk. Sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Dalam hal ini penjaga tambak memberikan jawaban atas kesepakatan kerja dari pemilik tambak. Sighat yang dilakukan oleh pemilik tambak dan penjaga tambak sudah memenuhi syarat.

3. *Ujrah* disyaratkan harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai harta. *Ujrah* dalam pengupahan penjaga tambak belum memenuhi syarat karena terdapatnya upah yang tidak jelas. Sedangkan dalam konsep ijarah, ujrah yang bersifat samar hukumnya fasid. Upah yang tidak jelas nominalnya disebabkan karena pemilik tambak tidak terbuka mengenai hasil panen dan modal,

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Dalam praktek pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk ini sudah memenuhi syarat karena yang melakukan akad tersebut adalah orang dewasa dan berakal, dan bukan termasuk orang gila maupun anak kecil (mumayyiz).

2. Sighat terdiri dari ijab dan kabul antara mu'jir dan musta'jir, dalam pengupahan penjaga tambak, ijab yang dilakukan disini yaitu penjelasan pemilik tambak kepada penjaga tambak tentang kesepakatan kerja antara pemilik tambak dan penjaga tambak mengenai pekerjaan penjagaan tambak di Desa Kedung Peluk. Sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Dalam hal ini penjaga tambak memberikan jawaban atas kesepakatan kerja dari pemilik tambak. Sighat yang dilakukan oleh pemilik tambak dan penjaga tambak sudah memenuhi syarat.

3. *Ujrah* disyaratkan harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai harta. *Ujrah* dalam pengupahan penjaga tambak belum memenuhi syarat karena terdapatnya upah yang tidak jelas. Sedangkan dalam konsep *ijarah*, *ujrah* yang bersifat samar hukumnya fasid. Upah yang tidak jelas nominalnya disebabkan karena pemilik tambak tidak terbuka mengenai hasil panen dan modal,

- [illegible]

e. Penjelasan tentang jenis pekerjaan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan. Dalam pengupahan penjaga tambak, pekerjaan yang dilakukan adalah menjaga tambak milik pemilik tambak. Hal ini sudah sesuai dengan objek ijarah.

Ayat tersebut menjebut menjelaskan bahwa Allah Swt mengajarkan kita untuk melakukan perniagaan dengan jalan yang baik dan memberikan hak-hak manusia sesuai dengan proposional serta fungsinya, agar mereka saling ridha. Jika mereka saling ridha maka akan tercipta sebuah kesejahteraan dan menjauhkan kita dari perpecahan serta kemungkaran. Oleh karena itu, pengupahan penjaga tambak yang tidak sesuai dalam syariat hukum Islam terkait pemberian upah yang tidak jelas nominalnya. Berdasarkan prakteknya, hal ini

Untuk dapat menyesuaikan dengan hukum Islam seharusnya ada keterbukaan pemilik tambak terkait ikan yang berhasil dipanen, dan banyaknya modal yang sudah dikeluarkan. Solusi dari pengupahan tersebut agar sesuai dengan hukum Islam adalah pemilik tambak memberitahu berapa banyak hasil ikan yang dipanen, upah dibayarkan sesuai perjanjian, beserta keterbukaan pemilik tambak terkait modal yang sudah dikeluarkan. Untuk masalah upah-mengupah dalam fiqh muamalah, maka menggunakan teori *ujrah*.

- a. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad, dan jika salah seorang diantara mereka dipaksa maka tidak sah. Dalam mekanisme pengupahan, penjaga tambak merasa tidak ridha karena upah yang diberikan kepada penjaga tambak tidak diberikan ketika panen. Melainkan upah yang diberikan hanya berbentuk bon saja, penjaga tambak juga tidak transparan terkait hasil panen dan modal yang dikeluarkan. Jika penjaga tambak tidak mengajukan bon kepada penjaga tambak, maka pemilik tambak tidak

dijelaskan bahwa upah akan diberikan ketika panen. Namun ketika panen, pemilik tambak tidak melakukan perhitungan modal dan upah kepada penjaga tambak. Hal ini bertentangan dengan syarat sah nya *ujrah*.

Adapun dasar diperbolehkannya upah dalam firman Allah Swt, salah satunya yaitu terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 77 dan At-Thalaq ayat 6. Dalam surah tersebut dijelaskan bahwa jika kalian memperkerjakan seseorang dalam hal baik, maka berikanlah upahnya.

tambak tidak memberikan upah kepada penjaga tambak. Hal ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razaq dijelaskan bahwa jika kita mempekerjakan seseorang kita harus menjelaskan dan menentukan upah yang akan diberikan kepada pekerja tersebut. Sedangkan dalam mekanisme pengupahan penjaga tambak, pemilik tambak memberikan upah yang tidak jelas nominalnya. Hal ini dikarenakan pemilik tambak tidak transparan terkait hasil panen dan modal. Pemilik tambak hanya memberikan upah dalam bentuk bon, tidak semua bon yang diajukan penjaga tambak disetujui oleh pemilik tambak.

Jadi mekanisme pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk telah menyimpang dari hukum islam, karena pemilik tambak tidak memberikan upah ketika panen yang dijelaskan pada awal akad dan upah yang diberikan pemilik tambak tidak jelas nominalnya. Dalam hukum islam, salah satu syarat ujah yaitu harus ada kerelaan antara kedua belah pihak. Namun penjaga tambak tidak rela terhadap upah yang diberikan oleh pemilik tambak, karena pemilik tambak tidak transparan terkait hasil panen dan modal.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, berikut kesimpulan yang didapatkan:

1. Pelaksanaan pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pada awal akad diberikan ketika panen. Namun, pemilik tambak melakukan perhitungan modal ketika sudah satu tahun (tiga kali masa panen), setiap bulan penjaga tambak boleh melakukan bon kepada pemilik tambak. Namun setiap bon tergantung persetujuan dari pemilik tambak, pemilik tambak memberikan upah kepada penjaga tambak sesuai dengan perkiraannya.
2. Dalam pandangan hukum Islam pengupahan penjaga tambak telah menyimpang, karena pemilik tambak telah menanggihkan upah penjaga tambak hingga tiga kali masa panen. Pemilik tambak memberikan upah kepada penjaga sesuai dengan perkiraannya sehingga upahnya menjadi samar. Sedangkan ujah yang samar hukumnya fasid.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Dalam melakukan pengupahan penjaga tambak, hendaknya pemilik tambak memperhatikan syarat-syarat dan rukun dalam pelaksanaannya. Agar dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Alex. *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*. Surabaya: Karya Harapan, 2005.
- Alamsyah, Fahmi Vidi. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”*, (Skripsi-IAIN Purwokerto: Banyumas, 2015).
- Albany al, Syaikh. *Ebook Mukhtashar Shahih Muslim revisi 1.03 update*. Jakarta: Pembuat Ebook Yoga Permana, 2009.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu’amalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Asqalany al, Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah Az-Zuhaili. *al-Fiqih al-Islami Wa Adilatuhu*, jilid V. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen, Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan. 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pegantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fadlullah, M. Farid *“Studi Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Berdasarkan Kelebihan Timbangan Di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”*, (Skripsi – UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2016).
- Ghazali, Abdul Rahman Ghazali, et al., *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan Dilakukan Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamala*. Jakarta: Gaya media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Gholia Indonesia, 2002.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: Grasindo, 2015.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

- Karim, Adimarwan. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Siti Lisah, “*Analisis Al’Urf terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Penyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan*”, (Skripsi-IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2012).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal, 2012.
- Mas’ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi’i*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 139.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010.
- Nor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Purnomo, Syaichul Hadi. *Antologi Kajian Islam*. Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2004.
- Qal’haji, M. Rawwas Qal’haji. *Ensiklopedia Fiqih Umar Bin Khattab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*. Jilid 4 (Jakarta : Pena Undi Aksara, 2006), 203.
- Sari, Septi Wulan. “*Pemberian Upah Pekerja Ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Bengkel Las Di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)*”, (Skripsi – IAIN Tulungagung: Tulungagung, 2015).
- Siti saroh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa dalam Praktik Ijol Garapan (Studi Kasus di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal)*”, (Skripsi-UIN Walisongo: Semarang, 2016).
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Syafe’i, Rachmat Syafe’i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka setia, 2001.
- Tirtobisono, Yan. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Bandung: Apollo Lestari, 2000.
- Tamwif, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.